

## ABSTRAK

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya pemungutan dan pelaporan pajak, Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap DPRD Provinsi Jambi Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, upah atau pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara kerja pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 telah sesuai dengan peraturanperundang undangan mekanisme tersebut diawali dengan pengecekan data pegawai pegawai, perhitungan PPh 21, pengiriman data, pembayaran PPh 21, pelaporan SPT Masa, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Tahunan. Meskipun beberapa periode ini Bendaharawan tidak melaporkan pajak ke KPP. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan diluar pembagian tugasnya. Sehingga profesionalitas Bendaharawan pun menjadi terganggu. Dinas Sosial Kabupaten Semarang bisa membuat SOP yang mengatur tentang pemungutan dan pelaporan pajak, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan dapat diberi teguran agar tidak dilakukan terus-menerus. Sesama pegawai di dinas harus saling mengingatkan untuk melakukan pelaporan pajak pegawai, perhitungan PPh 21, pengiriman data, pembayaran PPh 21, pelaporan SPT Masa, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Tahunan. Meskipun beberapa periode ini Bendaharawan tidak melaporkan pajak ke KPP. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan diluar pembagiantugasnya. Sehingga profesionalitas Bendaharawan pun menjadi terganggu. Dinas Sosial Kabupaten Semarang bisa membuat SOP yang mengatur tentang pemungutan dan pelaporan pajak, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan dapat diberiteguran agar tidak dilakukan terus-menerus. Sesama pegawai di dinas harus saling mengingatkan untuk melakukan pelaporan pajak.

**Kata Kunci:** *Pajak, pemungutan, pelaporan, mekanisme.*

## ABSTRACT

Taxes are mandatory levies from the people to the state. Tax payment is a manifestation of state obligations and the role of taxpayers to directly and jointly carry out tax obligations for state financing and national development. Given the importance of tax collection and reporting, this final project aims to find out the mechanism for collecting and reporting taxes, especially Income Tax Article 21 Permanent Employees of the DPRD Jambi Province. Income tax article 21 is a tax imposed on income in the form of salaries, allowances, wages or other payments related with work. The PPh 21 collection and reporting mechanism is carried out to provide an explanation of how the collection and reporting of income tax article 21 works. The results of the observations and interviews show that the mechanism for collecting and reporting PPh 21 is in accordance with the laws and regulations. The mechanism begins with checking employee data, calculating PPh 21, sending data, paying PPh 21, reporting periodical tax returns, making deduction slips and reporting annual tax returns. . Despite these several periods the Treasurer did not report taxes to the KPP. This is because there is a lot of work that must be done outside of the division of tasks. So that the professionalism of the Treasurer becomes disturbed. The Semarang Regency Social Service can make SOPs that regulate tax collection and reporting. Fellow employees in the service must remind each other to do tax reporting employees, calculating PPh 21, sending data, paying PPh 21, reporting Periodic SPT, making proof of withholding and reporting Annual SPT. Despite these several periods the Treasurer did not report taxes to the KPP. This is because there is a lot of work that must be done outside of the division of tasks. So that the professionalism of the Treasurer becomes disturbed. The Semarang Regency Social Service can make SOPs that regulate tax collection and reporting. Fellow employees in the service must remind each other to do tax reporting.

**Keywords:** *Tax, collection, reporting, mechanism.*